

Petunjuk pelaksanaan Undang-Undang RI. No. 14 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan

Dharma-Bhakti Group - Undang undang lalu lintas uu no 22 tahun 2009



Description: The law on traffic and road transport with implementary regulations.

-Petunjuk pelaksanaan Undang-Undang RI. No. 14 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan

-Petunjuk pelaksanaan Undang-Undang RI. No. 14 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan

Notes: Microfiche. Jakarta : Library of Congress Office ; Washington, D.C. : Library of Congress Photoduplication Service, 1994. 5 microfiches ; 11 x 15 cm.

This edition was published in 1993



Filesize: 49.86 MB

Tags: #Undang #undang #lalu #lintas #uu #no #22 #tahun #2009

Lalu lintas

Pasal 11 Mengenai besarnya jumlah pembayaran Dana dalam hal kematian atau cacat tetap maka penggantian maksimum daripada biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter dan penggantian biaya-biaya penguburan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 10 ayat 2 di atas ditentukan oleh Menteri. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh banyak hal, pengemudi kendaraan yang buruk, pejalan kaki yang kurang hati-hati, jalanan yang sudah berlubang tetap dibiarkan, ketidakpedulian pengemudi dengan sekitar, kendaraan yang sudah tidak layak lagi pakai, dan juga pengendara yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

Lalu lintas

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan b.

Lalu lintas

Pasal 16 1 Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 huruf b disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ruang kegiatan berskala provinsi.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1965 TENTANG

Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas; d. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Related Books

- [Executive economics - ten essential tools for managers](#)
- [Local government, AIDS, and gay men - results of a survey into the HIV and AIDS services of local go](#)
- [Principes en methoden der studie- en beroepsoriëntering](#)
- [Language and theme in Anita Desais fiction](#)
- [Nature, woman, and the art of politics](#)